



---

**Peran Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Pembentukan *Civic Virtue*  
Dalam Masyarakat Multikultural Menurut William Arthur Galston**  
(Sebuah Tinjauan dari Perspektif Filsafat Politik)

Gabriel Junior Ell  
Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng  
[gabrieljuniorell@gmail.com](mailto:gabrieljuniorell@gmail.com)

**Diajukan: 23 Desember 2022; Direview: 20 Desember 2022; Diterima: 10 Januari 2023; Dipublish: 21 Januari 2023**

---

**ABSTRACT:** *William Arthur Galston is one of the contemporary political philosophers. His great concern is about the reality of pluralistic society as appears in his writings on multiculturalism. Galston's thoughts generally depart from the facts of a pluralistic modern society. Galston understands civic virtue as the ability of each person to develop self-quality but also a capability to work with other people and have priority to support the public interest rather than personal or group interests with the aim that democracy can develop properly. To help the citizens understand and have civic virtue, education is needed, more precisely citizenship education. This means civics education has an important role. For this reason, Galston emphasizes that citizenship education can and even absolutely must be implemented in a liberal democratic country. Using description and analysis methods, this article attempts to explain the role of civic education in developing civic virtue as an important component in a multicultural society in the view of Galston.*

**KEYWORDS:** Kebajikan sipil, pendidikan kewarganegaraan, masyarakat multikultural

## **Pendahuluan**

Masyarakat kita dewasa ini adalah masyarakat yang majemuk atau multikultural. Hidup di tengah realitas seperti itu, di satu sisi dapat menjadi berkat karena bisa saling memperkaya. Di lain sisi, situasi tersebut tak jarang menimbulkan ketegangan atau bahkan konflik akibat perbedaan-perbedaan yang dimiliki, entah menyangkut cara hidup maupun kebiasaan dan keyakinan. Bila ketegangan atau konflik bisa dikelola dengan baik, maka dapat membawa dampak yang baik bagi hidup bersama. Namun, jika tidak ditangani dengan baik dan bijak, maka akan menghasilkan pertikaian

bahkan perang. Mengatasi kemungkinan tersebut, maka salah satu hal yang dibutuhkan oleh seorang warga negara yang baik, menurut William Arthur Galston, adalah memiliki kebajikan sipil (*civic virtue*) di dalam hidupnya. Adanya kebajikan sipil diperlukan guna membantu warga negara menata kebersamaan hidup dengan sesama warga agar tercipta kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dengan kata lain, tujuannya, membantu warga masyarakat menciptakan kehidupan bersama yang harmonis dan sejahtera.

Bagaimana kebajikan sipil itu dibentuk dalam diri setiap warga negara, terutama kaum muda? Jawabannya, menurut Galston, adalah melalui pendidikan sipil atau pendidikan kewarganegaraan. Itu berarti pendidikan sipil adalah kemustian bagi negara-negara demokrasi dengan masyarakat yang majemuk, seperti di Indonesia. Dasarnya, karena pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana yang baik dan tepat bagi negara guna membentuk setiap warga negara, khususnya kaum muda untuk menjadi individu-individu yang berkebijakan sipil.<sup>1</sup> Demikian, sekolah, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, perlu memberi ruang yang memadai bagi pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan sehingga ikut membentuk peserta didik untuk dapat hidup bermasyarakat dengan baik dengan sesamanya karena memiliki kebajikan sipil. Demikian, jelas kiranya bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah membahas paham Galston tentang peran pendidikan kewarganegaraan guna membangun kebajikan sipil dalam masyarakat yang multikultural. Pembahasan terbagi atas beberapa bagian. Bagian pertama, menjelaskan riwayat Hidup Galston dan latar belakang pemikirannya. Bagian kedua, membahas pemikiran Galston mengenai kebajikan sipil dan bagian ketiga menguraikan pentingnya peranan pendidikan sipil menurut Galston disertai kritik ringkas atas pemikirannya.

---

<sup>1</sup> Felix Baghi, *Kewarganegaraan Demokratis Dalam Sorotan Filsafat Politik* (Maumere: Ledalero, 2009), 414-415.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **William Galston dan Latar Belakang Pemikirannya**

William Arthur Galston lahir pada tanggal 17 Januari 1946. Ia kini berusia 74 tahun. Saat ini Galston menjabat sebagai ketua Ezra K. Zilkha pada Program Studi Pemerintahan di Brookings Institution. Galston mengenyam pendidikan di Universitas Cornell dan Universitas Chicago. Gelar *The Bachelor of Arts* (B.A) diperoleh dari Universitas Cornell (1967). Gelar *Master of Arts* (1969) dan *Doctor of Philosophy* (Ph.D) didapatkan dari Universitas Chicago (1973). Selain mengenyam pendidikan resmi di universitas, Galston juga pernah mengikuti wajib militer dan melayani sebagai sersan di Korps Marinir Amerika Serikat pada tahun 1969 hingga 1970. Selepas studi, Galston menghabiskan banyak waktu bekerja di bidang akademik dan politik. Ia bahkan menempati banyak posisi penting pada kedua bidang tersebut.<sup>2</sup>

Sebagai salah satu filsuf politik kontemporer yang berminat pada persoalan kewarganegaraan modern, secara khusus realitas masyarakat yang majemuk. Perhatiannya yang besar terhadap realitas masyarakat yang majemuk terutama tampak pada tulisannya tentang multikulturalisme. Karena minat dan perhatiannya tersebut, maka selain terlibat dalam dunia pemerintahan, Galston juga menghabiskan banyak waktu di dunia akademik. Dari dunia yang telah membesarkannya, Galston telah menulis dan menghasilkan 12 buku dan lebih dari 100 artikel di bidang teori politik, kebijakan publik dan politik Amerika.<sup>3</sup>

Sebagai filsuf politik dari kalangan liberal, Galston menaruh perhatian dan pembahasan pada masalah keberagaman dari perspektif liberalisme. Menurutnya, keberagaman tidak bisa dilepaskan dari liberalisme. Dengan kata lain liberalisme melekat dengan aspek keberagaman. Liberalisme, dalam pandangannya, menghendaki sebuah asumsi yang kuat untuk mendukung individu dan kelompok menuju

---

<sup>2</sup> Brookings, "William A. Galston", diambil dari: [https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/05/20170119\\_billgalston\\_cv](https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/05/20170119_billgalston_cv) (20 Oktober 2020).

<sup>3</sup> Brookings, "William A. Galston".

kehidupan yang dipandang cocok bagi mereka. Terkait hal itu, terdapat tiga prinsip liberalisme atau tiga sumber liberal pluralisme yang digagas oleh Galston, yakni<sup>4</sup>: *Pertama*, kebebasan ekspresif (*expressive liberty*). Galston memaknainya sebagai ketiadaan halangan bagi individu ataupun kelompok dalam mengaktualisasikan jalan hidup yang memiliki makna bagi mereka. *Kedua*, pluralisme moral (*moral pluralism*). Ini adalah konsep yang memberikan ruang yang lebih besar kepada individu dan kelompok. *Ketiga*, pluralisme politik (*political pluralism*). Galston memaknai konsep ini sebagai gagasan yang menentang aksi negara yang serba kuasa.

Di sini tampak jelas bahwa pemikiran Galston pada umumnya dipengaruhi oleh liberalisme. Selain itu, pemikirannya juga dipengaruhi oleh beberapa filsuf liberalisme lain seperti Isaiah Berlin dan John Gray. Kedua pemikir ini sangat mempengaruhi pemikiran Galston mengenai prinsip keberagaman. Sebab, tercatat bahwa sebagian dari prinsip keberagaman Galston dipengaruhi gagasan Isaiah Berlin, terutama gagasan *value pluralism* dan *expressive liberty*. Hal itu dapat disimak dari kompatibilitas antara Galston dan Berlin yang sama-sama menempatkan keberagaman sebagai sesuatu yang penting, namun keberagaman itu tidak bisa dijadikan bertingkat dan disepadankan. Keberagaman itu juga akan memberi ruang bagi individu untuk memilih atau berekspresi. Selain itu, dalam menggagas keberagaman Galston juga segaris dengan John Gray yang menempatkan keberagaman dalam posisi penting dan layak mendapat perhatian.<sup>5</sup>

Terkait pokok keberagaman ini, maka bagian kedua bab ini membahas mengenai pengertian multikulturalisme dan gambaran umum mengenai masyarakat multikultural. Multikulturalisme adalah paham dalam filsafat politik tentang bagaimana seharusnya bersikap menanggapi perbedaan budaya dan agama dalam masyarakat secara wajar dan pantas. Dalam prosesnya, hal itu tidak mudah untuk diwujudkan. Sebab, hidup di

---

<sup>4</sup> Muhammad Iswardani Chaniago, *Gagasan Multikulturalisme dalam Konteks Kelompok Keagamaan, Perspektif William A. Galston dan Yusuf al-Qaradawi* (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019), 167-169.

<sup>5</sup> Chaniago, 169-172.

dalam masyarakat multikultural tentunya ada rupa-rupa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya kita harus mampu menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Demikian, menurut Galston, dibutuhkan kebijakan atau keutamaan sipil dalam diri individu dan masyarakat untuk membentuk masyarakat yang plural yang berwajahkan kedamaian dan kerukunan.

### **Konsep Kebijakan Sipil Menurut William Galston**

Secara umum kebijakan sipil dimengerti sebagai kemauan warga negara untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kebijakan sipil atau kebijakan kewarganegaraan memiliki dua unsur penting, yakni watak atau sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) dan komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*). Watak kewarganegaraan merujuk pada sejumlah kebiasaan dan sikap warga dalam menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan atas kepentingan umum dalam sistem demokrasi. Sedangkan komitmen kewarganegaraan merujuk pada kesediaan secara sadar untuk menerima, memegang teguh nilai dan prinsip demokratis.<sup>6</sup>

Menurut Charles N. Quigley kebijakan sipil itu mencakup ciri-ciri dan karakter, disposisi, dan komitmen yang penting bagi pemeliharaan dan perbaikan pemerintahan dalam kewarganegaraan demokratis.<sup>7</sup> Sementara menurut Bernard L. Bray dan Larry W. Chappel mengatakan bahwa kebijakan sipil adalah karakter dan ketrampilan-ketrampilan pribadi yang diperlukan untuk berlatih menjadi warga negara bermakna.<sup>8</sup> Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan sipil adalah suatu kebijakan warga negara berupa sikap baik dan komitmen untuk nilai-nilai yang terwujud dalam kehidupan bermasyarakat,

---

<sup>6</sup> Winarno, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi dan Penilaian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 181.

<sup>7</sup> Charles N. Quigley, "Global Trends in Civic Education" (29 Maret 2000), diambil dari: [https://www.civiced.org/papers/articles\\_indonesia.html](https://www.civiced.org/papers/articles_indonesia.html) (29 Januari 2022).

<sup>8</sup> I Putu Windu Mertha Sujana, "Civic Virtue dalam Rangka Mewujudkan Pemilu Harmoni dan Berkeadilan", *Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 2 No. 2, 17 Oktober 2019, 6.

berbangsa dan bernegara. Kebajikan sipil juga berarti suatu sikap atau kemauan warga negara untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dalam suatu komunitas. Contoh konkret kebajikan sipil adalah keberanian, ketabahan, keterampilan, semangat kewarganegaraan yang dimiliki seorang warga negara.

Galston sendiri memahami kebajikan sipil sebagai kemampuan setiap orang mengembangkan kualitas diri dan bekerja sama dengan orang lain serta memiliki prioritas untuk mendukung kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi atau kelompok dengan tujuan agar demokrasi dapat berkembang dengan baik. Titik tolak munculnya kesadaran akan penting dan perlunya kebajikan sipil adalah pluralitas kehidupan dalam masyarakat modern.<sup>9</sup> Sederhananya, mengingat realitas masyarakat semakin kompleks dan plural, maka amat dibutuhkan kebajikan sipil guna membantu masyarakat membentuk kehidupan bersama yang baik, rukun dan sejahtera.

Galston membagi kebajikan sipil atas empat (4) kelompok. Keempat kebajikan sipil itu adalah:<sup>10</sup> *Pertama*, kebajikan umum seperti keberanian, patuh pada hukum-hukum dan kesetiaan; *Kedua*, kebajikan sosial seperti kemandirian dan sikap terbuka; *Ketiga*, kebajikan ekonomi, seperti semangat kerja, kemampuan menunda pemenuhan kesenangan diri, sanggup menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi; *Keempat*, kebajikan politis, seperti sanggup melihat dan menghormati hak-hak orang lain, rela meminta hal yang dapat diupahi, kesanggupan menilai bobot tingkah laku pelayanan pegawai, real melibatkan diri ke dalam wacana publik. Untuk membantu warga negara, terutama kaum muda memiliki kebajikan sipil, maka yang dipakai ialah pendidikan. Tepatnya, sarana yang tepat untuk mengembangkan kebajikan sipil dalam diri setiap warga, khususnya kaum muda adalah pendidikan sipil.

---

<sup>9</sup> Felix Baghi, *Kewarganegaraan Demokratis Dalam Sorotan Filsafat Politik* (Maumere: Ledalero, 2009), 413.

<sup>10</sup> Felix Baghi, 414.

## Peran Pendidikan Kewarganegaraan dan Kritik Terhadap Galston

Pendidikan kewarganegaraan merupakan terjemahan dari dua istilah teknis dalam kepustakaan asing, yakni *civic education* dan *citizenship education*.<sup>11</sup> *Citizenship education* adalah pendidikan untuk pembentukan karakter warga negara yang dapat dilakukan melalui berbagai jalur dan lembaga seperti keluarga, sekolah, komunitas, media dan sebagainya. Sedangkan *civic education* adalah pendidikan untuk pembentukan karakter warga negara yang dilakukan melalui sekolah. Meskipun berbeda pengertian namun kedua istilah tersebut pada hakikatnya sama, yakni pendidikan untuk menjadi warga negara. Dari pengertian tersebut, nampak bahwa tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar terwujudnya kebajikan kewarganegaraan dalam diri setiap warga negara.

Itu berarti pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting sebagai sarana atau instrumen yang diperlukan oleh warga negara dan warga masyarakat untuk memiliki kebajikan sipil. Itulah mengapa Galston menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) dapat dan bahkan mutlak untuk dilaksanakan di dalam negara demokratis liberal. Pendidikan kewarganegaraan ini diberikan terutama kepada kaum muda. Sebab, dalam pandangan Galston, tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk karakter anggota masyarakat terutama kaum muda agar menjadi warga negara yang baik, guna mendukung komunitas politik mereka.<sup>12</sup> Dengan kata lain, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah agar setiap warga negara terutama kaum muda memiliki pemahaman dan terutama kebajikan sipil guna membantu mereka bertumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang baik, demokratis dan bertanggung jawab dalam hidup bernegara dan bermasyarakat.

Meskipun demikian, pendidikan kewarganegaraan menuai kontroversi di negara demokrasi liberal, seperti Amerika Serikat. Namun,

---

<sup>11</sup> Winarno, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi dan Penilaian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 1-7.

<sup>12</sup> M. Victoria Costa, "Galston on Liberal Virtues and The Aims of Civic Education" (Florida State University, 2006), 280-281.

bagi Galston pendidikan kewarganegaraan di negara demokrasi liberal merupakan upaya yang penting untuk membangun nilai-nilai demokrasi, karakter yang baik bagi warga negara, keterampilan berpartisipasi aktif dalam ranah publik, kepedulian sosial, kemandirian, sikap toleransi terhadap keberagaman, tanggungjawab serta menumbuhkan kesetiaan terhadap negara.<sup>13</sup> Terkait hal itu, karena pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting dalam negara demokrasi liberal, terutama bagi kaum muda sehingga menurut Galston, sekolah merupakan tempat yang sangat tepat dan strategis untuk membentuk kebajikan sipil karena melalui pengajaran dan pendidikan (kewarganegaraan) yang diberikan secara baik dan berkelanjutan, besar kemungkinan bahwa setiap anak yang memiliki kebajikan sipil sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam ranah publik. Karena itu, nilai-nilai kebajikan sipil yang diharapkan dimiliki orang setiap warga negara antara lain; toleransi antar keberagaman, kemandirian, menghormati hak orang lain, dapat berpartisipasi aktif dalam ranah publik, dan lain-lain.

Meskipun berkontribusi bagi pemahaman akan penting kebajikan sipil bagi pembentukan masyarakat yang demokratis, konsep *civic virtue* William Galston tetap tidak luput dari kritik. Salah satu tokoh yang mengkritik konsep Galston, yaitu James Bernard Murphy. Dalam artikelnya, Murphy berpendapat bahwa tidak saja kebajikan manusiawi yang bernilai pada dirinya. Namun, kebajikan sipil pun bernilai secara intrinsik. Karena ia bernilai pada dirinya, maka dibutuhkan untuk menjamin kehidupan bersama, meski belum tentu dipraktikkan oleh semua orang dalam kehidupan bersama, bernegara dan bermasyarakat. Layaknya sebuah pernikahan memiliki nilai pada dirinya, kendati tidak semua orang atau warga negara harus menikah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Alil Rinenggo dan Abdul Karim, "Kontroversi Pendidikan Kewarganegaraan di Negara Liberal," Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan Vol. 09 No. 01, 29 April 2021, 69.

<sup>14</sup> Muhammad Iswardani Chaniago, *Gagasan Multikulturalisme dalam Konteks Kelompok Keagamaan (Perspektif William A. Galston dan Yusuf al-Qaradawi)* (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019), 111-112.



## Penutup

William Arthur Galston adalah salah satu filsuf politik kontemporer yang berminat pada persoalan kewarganegaraan modern, secara khusus realitas masyarakat yang majemuk. Perhatiannya yang besar terhadap realitas masyarakat yang majemuk terutama tampak pada tulisannya tentang multikulturalisme. Tidak mengherankan jika Galston menjadikan realitas masyarakat yang majemuk atau multikultural tersebut sebagai titik tolak pemikirannya. Baginya, hidup dalam negara dan masyarakat demokratis tidak bisa dihindarkan dari fakta kemajemukan. Karena itu, untuk menjamin kehidupan yang baik dan harmonis, maka diperlukan kebijakan sipil atau (*civic virtue*). Apa itu *civic virtue*? Secara umum *civic virtue* itu dimengerti sebagai kemauan warga negara untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.

Galston sendiri memahami kebijakan sipil sebagai kemampuan setiap warga negara untuk mengembangkan kualitas dirinya serentak kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain serta mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dengan tujuan agar demokrasi dapat berkembang dengan baik dan matang. Bagaimana *civic virtue* itu dibentuk? Jawabannya, menurut Galston, adalah melalui pendidikan sipil atau pendidikan kewarganegaraan. Itu berarti, pendidikan kewarganegaraan ini memiliki peran yang besar dalam membentuk kebijakan sipil dalam menghadapi realitas masyarakat modern yang majemuk atau multikultural.

Maka dari itu, Galston menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) dapat dan bahkan mutlak untuk dilaksanakan di dalam negara demokratis liberal. Karena itu, sangat diharapkan bahwa setiap warga negara, terutama kaum muda mendapatkan pendidikan kewarganegaraan yang baik dan memadai sehingga membantu mereka memiliki kebijakan sipil yang memungkinkan mereka untuk bersikap dan berperilaku sebagai warga negara yang baik serta aktif berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Terkait hal itu, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) di sekolah sangat penting dijalankan dengan baik. Mengapa?

Alasannya, karena melalui pendidikan kewarganegaraan siswa difasilitasi untuk memahami keberagaman serentak memiliki kebajikan kewarganegaraan (*civic virtue*) yang berguna bagi kehidupan sebagai seorang warga negara.

Kendati telah berupaya menguraikan pentingnya kebajikan sipil dan pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat multikultural, paham Galston, khususnya kebajikan sipil tidak luput dari berbagai kritik. Salah satu kritik atas konsep kebajikan sipil Galston datang dari James Bernard Murphy. Dalam artikelnya, Murphy berpendapat bahwa tidak saja kebajikan manusiawi yang bernilai pada dirinya. Namun, kebajikan sipil pun memiliki nilai intrinsik. Karena ia bernilai pada dirinya, maka dibutuhkan untuk menjamin kehidupan bersama, meski belum tentu dipraktikkan oleh semua orang di dalam kehidupan bersama, bernegara dan bermasyarakat. Layaknya sebuah pernikahan memiliki nilai pada dirinya, kendati tidak semua orang atau warga negara harus menikah. Itu berarti, pada dasarnya setiap orang dalam sebuah negara tertentu harus menjadi warga negara yang baik dan aktif tanpa harus dipaksakan.

## Daftar Pustaka

- Alil dan Abdul Karim Rinenggo. "Kontroversi Pendidikan Kewarganegaraan di Negara Liberal," *Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan* Vol. 09 No. 01, 29 April 2021.
- Brookings, "William A. Galston", diambil dari: [https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/05/20170119\\_billgalston\\_cv](https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/05/20170119_billgalston_cv) (20 Oktober 2020).
- Charles N. Quigley. "Global Trends in Civic Education" (29 Maret 2000), diambil dari: [https://www.civiced.org/papers/articles\\_indonesia.html](https://www.civiced.org/papers/articles_indonesia.html) .29 Januari 2022.
- Felix Baghi. *Kewarganegaraan Demokratis Dalam Sorotan Filsafat Politik*. Maumere: Ledalero, 2009.
- I Putu Windu Mertha Sujana. "Civic Virtue dalam Rangka Mewujudkan Pemilu Harmoni dan Berkeadilan", *Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 2 No. 2, 17 Oktober 2019.
- Muhammad Iswardani Chaniago. *Gagasan Multikulturalisme dalam Konteks Kelompok Keagamaan, Perspektif William A. Galston dan Yusuf al-Qaradawi*. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019.
- Victoria M. Costa. "Galston on Liberal Virtues and The Aims of Civic Education". Florida State University, 2006.
- Winarno, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi dan Penilaian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.